

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good government* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu instrumen dari SAKIP merupakan laporan instansi pemerintah yang menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pelaporan kinerja tersebut, masing-masing unit kerja dapat melakukan evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara *Self Assessment* oleh masing-masing instansi pemerintah. Hal ini dapat diartikan instansi pemerintah melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi. Upaya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama menjalankan tugasnya *“melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka koordinasi di bidang hubungan masyarakat serta acara protokoler dan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Pemerintah Daerah”* sesuai Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 44 Tahun 2010. Berdasarkan LAKIP ini diharapkan dapat diperoleh gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019, sehingga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur bagi upaya peningkatan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud penyusunan LAKIP Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur ini adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dalam upaya penyempurnaan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan instansi, khususnya di Tahun Anggaran 2019.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dibuatnya LAKIP Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 adalah :

- a) Sebagai media pertanggungjawaban Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur terhadap Bupati Manggarai Timur;
- b) Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur;
- c) Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- d) Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Tahun 2019;
- e) Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur;
- f) Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
- g) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- h) Sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 20 Kabupaten / Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4752). Sebagai kabupaten Otonom baru sesuai amanat undang-undang tersebut di atas maka dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang kabupaten Manggarai Timur dan menciptakan serta memelihara niat baik dan saling pengertian antara pemerintah kabupaten Manggarai Timur dengan segenap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 membentuk sub bagian Humas dan Protokol yang merupakan sub bagian dari bagian Umum untuk melaksanakan tugas-tugas protokoler dan

kehumasan. Tetapi pada pertengahan 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2009 Humas dan Protokol menjadi Bagian yang terlepas dari Bagian Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2009 itu pula menerangkan bahwa Bagian Humas dan Protokol mempunyai 2 sub bagian yaitu sub bagian Hubungan Masyarakat dan sub bagian Protokol. Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bagian Humas dan Protokol menambah satu sub bagian yaitu sub bagian Dokumentasi dan Peralatan. Dengan demikian dapat digambarkan Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol sebagai berikut :



Keterangan : _____ = Garis komando
- - - - - = Garis koordinasi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2016, dimana Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka koordinasi di bidang hubungan masyarakat serta acara protokoler dan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kehumasan dan Protokoler;
2. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan;
3. Penyusunan rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan;
4. Pendokumentasian dan penyiapan sarana dan peralatan;
5. Penyusunan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah dan protokoler;

6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Susunan Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh 4 PNS dengan komposisi menurut jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan eselon sebagai berikut:

Tabel 1

PNS Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur

BERDASARKAN JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Bagian Humas dan Protokol	1
2	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	1
3	Kepala Sub Bagian Protokol	1
4	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Peralatan	-
5	Staf Pelaksana	1
JUMLAH		4

*data per Desember 2019

Tabel 2

PNS Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur

BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 1	3
2	Diploma 3	1
JUMLAH		4

*data per Desember 2019

Tabel 3

PNS Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur

BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	3
3	Golongan II	-
4	Golongan I	-
JUMLAH		4

*data per Desember 2019

Tabel 4
PNS Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur
BERDASARKAN ESELON

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon I	-
2	Eselon II	-
3	Eselon III	1
4	Eselon IV	2
5	Staf	1
	J U M L A H	4

*data per Desember 2019

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);

9. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, serta Tata kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Nomor 32)

E. SISTIMATIKA LAPORAN

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur
 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
 2. Susunan Organisasi
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini Berisi :

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019
 1. Visi
 2. Misi
 3. Agenda Pembanguna Daerah
 4. Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur
 5. Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 6. Faktor – Faktor Penentu Keberhassilan
- B. Penetapan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi :

- A. Akuntabilitas Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019
 - 1. Perbandingan Evaluasi Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2018 – 2019
 - 2. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja
 - 3. Permasalahan dan Solusi
- B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Bagian Humas dan Protokol
- C. Akuntabilitas Keuangan dan Aspek Kepegawaian Bagian Humas dan Protokol

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 -2019

1. Visi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik lokal, Nasional, Regional dan Global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergik, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Adapun Visi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 adalah : **“MEMBANGUN KEHUMASAN DAN PROTOKOLER YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN CERDAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”** merupakan visi yang harus dicapai.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan aparatur kehumasan yang profesional dalam mengelola informasi
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi dan komunikasi

3. Agenda Pembanguna Daerah

Adapun yang menjadi agenda utama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- b. Melakukan kerjasama Informasi dan Mass Media melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan barang dan jasa iklan pada media cetak/elektronik.

4. Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan Renstra 5 tahunan tersebut, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur telah merumuskan rencana kerja tahun 2019 yang merupakan rencana strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Manggarai Timur selama satu tahun (Tahun 2019) yang merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana ini merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2019, Bagian Humas dan Protokol telah menentukan Tujuan dan Sasaran utama, antara lain :

a. Tujuan

- Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Meningkatnya diseminasi (penyebarluasan) informasi publik yang dihasilkan Pemerintah;
- Mewujudkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi;
- Mewujudkan pelayanan kehumasan dan protokoler yang efektif dan terpadu;
- Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas pada semua instansi;
- Meningkatnya pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan Daerah, pejabat Negara di daerah serta kegiatan-kegiatan Kenegaraan di daerah

b. Sasaran

- Masyarakat dapat mendukung kebijakan Pemerintah melalui informasi yang akurat.
- Terwujudnya pelayanan informasi kehumasan kepada internal dan eksternal publik yang akurat dan benar.
- Terwujudnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyampaian Informasi Pemerintah.
- Meningkatnya layanan informasi kehumasan secara efektif dan efisien dengan membentuk Pusat Pengaduan;

- Terwujudnya pola kerja pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang efektif dan terpadu.
- Tercapainya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas pada semua instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
- Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kenegaraan di daerah dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Bagian Humas dan Protokol telah menentukan Sasaran Strategis di Tahun 2019, yaitu: “**Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**”. Dari sasaran strategis tersebut telah ditentukan indikator kinerja utama untuk tahun 2019, yaitu:

- a. Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di masyarakat dengan target 100%;
- b. Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah dengan target 100%.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bagian Humas dan Protokol disajikan dalam bentuk tabel seperti pada lampiran 1.

6. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Adapun Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen untuk meningkatkan transparansi dan kerja sama efektif antara birokrasi pemerintahan;
- Terbukanya akses yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- Terbukanya ruang/wadah bagi pengembangan diri dan peningkatan kualitas SDM pegawai;
- Mengembangkan penyebaran informasi mengenai pembangunan yang komprehensif;
- Meningkatkan sistem informasi yang baik dengan mengacu pada tata ruang, kebijakan dan grand strategi daerah ;
- Meningkatkan kualitas data yang valid dan mudah di akses dengan sistem yang berlaku;
- Meningkatkan SDM yang berkualitas untuk menguasai teknologi informasi dan tata keprotokolan.

B. Penetapan Kinerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Penetapan target kinerja memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dalam Penetapan Kinerja (PK) Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerjanya adalah:

- Sasaran : Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- Indikator Kinerja :
 1. Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di masyarakat (target 100%), dengan Program dan Kegiatan:
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan utamanya:
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.958.000,- dan dalam Perubahan APBD tidak mengalami penambahan.
 - Penyediaan Barang dan Jasa Iklan pada Media Cetak/Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.500.000,-
 2. Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah (target 100%), dengan Program dan Kegiatan:
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan utamanya :
 - Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 103.500.000,- dan dalam Perubahan APBD mengalami penambahan sebesar Rp. 37.250.000,- sehingga total anggaran sebesar Rp. 140.750.000,-

Sasaran Strategis Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur yang disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RRPJMD) Kabupaten Manggarai Timur. Dan berikut merupakan program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol yang dijalankan selama tahun 2019 :

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88.131.000	88.131.000	0,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.535.000	19.535.000	0,00
	Penyediaan ATK	24.792.000	24.792.000	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.990.000	6.990.000	0,00
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000	1.025.000	0,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.620.000	22.620.000	0,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.560.000	1.560.000	0,00
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	116.184.400	153.934.400	32,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	70.252.000	70.252.000	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	13.650.000	13.650.000	0,00
	Pengadaan Alat – Alat Studio	45.000.000	45.000.000	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rapat Koordinasi Lintas SKPD	1.655.000	1.655.000	0,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	103.500.000	140.750.000	35,99
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.	161.958.000	161.958.000	0,00
	Penyediaan Barang dan Jasa Iklan pada Media Cetak/Elektronik	32.500.000	32.500.000	0,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Akuntabilitas Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019

1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	%	100	100	100
	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	%	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2019 capaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dikatakan berhasil sesuai dengan target yaitu 100% dengan realisasi 100%.

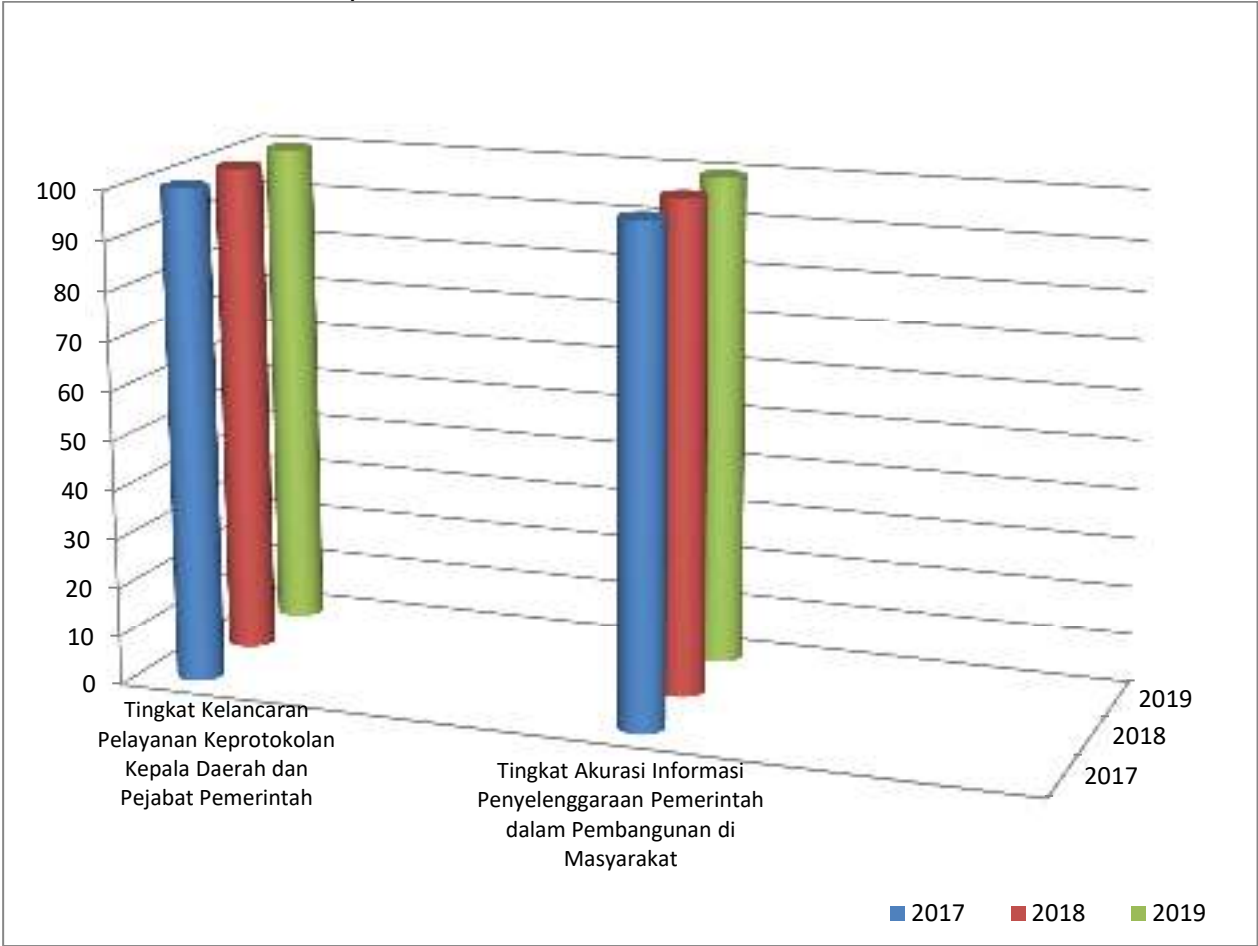
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018 dan 2019

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja 2017			Capaian Kinerja 2018			Capaian Kinerja 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dapat mempertahankan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 yaitu dari target 100% dengan realisasi 100% dan pada tahun 2019 dari target 100% juga realisasinya 100%.

Grafik Capaian Indikator dari Tahun 2017, 2018 dan 2019



3. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Penilaian capaian kinerja instansi pemerintah biasanya dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) sesuai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perhitungan prosentase pencapaian rencana (**target**) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Persentase pencapaian kinerja tahun 2019 pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur adalah **100%** dengan rincian capaian per indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat yakni dari target yang ditetapkan yaitu 100 % dan capaian targetnya 100%.
2. Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah yakni dari target yang ditetapkan yaitu 100% dan capaian targetnya 100%.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur adalah belum optimalnya fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada Tahun 2019 Bagian Humas dan Protokol tidak merencanakan dan melaksanakan semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra 2014-2019. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan SDM pada Bagian Humas dan Protokol dan juga kekurangan alokasi dana.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2019 dalam mencapai sasaran diantaranya adalah :

1. Lemahnya pengorganisasian pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur;
2. Minimnya jumlah aparatur/pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur;
3. Minimnya pengetahuan kehumasan dan keprotokolan yang dimiliki oleh pegawai/aparatur, yang disebabkan oleh karena kurangnya pelatihan atau

bimbingan teknis berkaitan dengan kehumasan dan pelayanan keprotokolan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka ditempuh langkah-langkah atau solusi sebagai berikut:

1. Mengorganisir Pegawai/Aparatur pada Bagian Humas dan Protokol sesuai bidang tugas, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan;
2. Memotivasi aparatur Humas dan Protokol agar bekerja lebih efektif;
3. Untuk memenuhi Pegawai/Aparatur yang berkualifikasi khusus di bidang kehumasan dan keprotokoleran, maka Pegawai/Aparatur Bagian Humas dan Protokol dipandang perlu untuk mengikuti Pelatihan atau Diklat Kehumasan dan Keprotokoleran.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019

Untuk mengukur besarnya masing-masing program yang dilaksanakan di lingkungan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi kinerja merupakan satu metode atau proses penilaian terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. Di dalamnya mencakup pengukuran tingkat efisiensi dan efektifitas institusi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan. Selain itu, dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara rencana dan target dengan realisasi hasil, manfaat atau dampak.

Dengan melakukan evaluasi capaian kinerja, maka dapat diketahui berbagai hambatan dan penyebabnya yang dihadapi dalam pencapaian visi dan misi Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur, yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan mempelajari hambatan dan permasalahan yang terjadi, maka dapat ditentukan strategi pemecahan masalah agar hal yang sama tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai proses pencapaian keberhasilan atau kegagalan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur, maka dilakukan pengukuran selama tahun 2019 yang uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Tabel Capaian Kinerja Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	2018			Target Akhir RPJMD (2019)	Capaian s.d 2019 Terhadap 2019(%)
			Target	Realisasi	Perentase		
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	100%	100%	100%	100%	88,33%
		Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*). Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*), mengapa atau sebab apa realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan juga dengan cara membandingkan antara capaian target Tahun 2019 terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2019. Dengan melakukan perbandingan, maka dapat diketahui capaian target sampai dengan Tahun 2019 sudah mencapai berapa persen dari target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019. Adapun capaian target sampai dengan Tahun 2019 terhadap capaian target akhir periode RPJMD dapat kami jabarkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah yakni dari target yang ditetapkan yaitu 100% dan capaian targetnya 100%.
2. Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat yakni dari target yang ditetapkan yaitu 100% dan capaian targetnya 100%.

Kondisi tersebut di atas menjelaskan bahwa Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur “**Berhasil**” mencapai sasaran strategisnya yang merupakan keberhasilan organisasi.

Dalam tahun 2019 Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai melalui program dan kegiatan. Semua kegiatan yang dimaksud telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, dan merupakan komitmen Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur dalam mengimplementasikan Rencana Strategisnya.

Dari semua program dan kegiatan di atas, hanya 2 program dengan 3 kegiatan yang merupakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada Bagian Humas dan Protokol, sedangkan program dan kegiatan lainnya merupakan program dan kegiatan operasional (pendukung) Bagian Humas dan Protokol selama Tahun 2019.

C. Akuntabilitas Keuangan dan Aspek Kepegawaian Bagian Humas dan Protokol Tahun 2019

1. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana seperti tertuang dalam APBD Kabupaten Manggarai Timur dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 711.352.400,- dimana dalam perjalanan pelaksanaannya anggaran ini mengalami perubahan (penambahan) anggaran dalam struktur APBD Perubahan anggaran 2019 sebesar Rp. 75.000.000, sehingga total anggaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 786.352.400 dan telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, yang terdiri dari:

TOTAL BELANJA LANGSUNG	:	Rp. 786.352.400,-	
Anggaran Belanja Pegawai sebesar	:	Rp. 223.997.200,-	
Realisasi/ Penggunaan Dana sebesar	:	Rp. 222.811.300,-	(99,47%)
Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar	:	Rp. 518.375.200,-	
Realisasi/ Penggunaan Dana sebesar	:	Rp. 512.102.500,-	(98,79%)
Anggaran Belanja Modal sebesar	:	Rp. 43.980.000	
Realisasi/ Penggunaan Dana sebesar	:	Rp. 43.980.000	(100%)

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Sedangkan rincian akuntabilitas keuangan Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur beserta realisasinya disajikan sebagai berikut:

Table 3.5. Akuntabilitas Keuangan

No.	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Rp. 194.458.000	Rp. 192.408.000	98,95
			1.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Rp. 161.958.000	Rp. 159.908.000	98,73
			2.	Penyediaan Barang dan Jasa Iklan pada Media Cetak/Elektronik	Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000	100
			Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Rp. 140.750.000	Rp. 139.700.000	99,25
		Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	1.	Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 140.750.000	Rp. 139.700.000	99,25
J U M L A H					Rp. 335.208.000	Rp. 332.108.000	99,08

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam akuntabilitas keuangan Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari :

- a. Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 194.458.000 dan realisasi sebesar Rp. 192.408.000 atau 98,95%.
- b. Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 140.750.000 dan realisasi sebesar Rp. 139.700.000 atau 99,25%.
- c. Total anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 335.208.000 dengan realisasi sebesar Rp. 332.108.000 atau 99,08%.

Table 3.6. Program dan Kegiatan Penunjang IKU

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	320.587.400	318.657.400	99,40
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88.131.000	86.981.000	98,70
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.535.000	19.535.000	100
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.792.000	24.792.000	100
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.990.000	6.990.000	100
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000	1.025.000	100
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.620.000	21.840.000	96,55
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	1.560.000	1.560.000	100
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	153.934.400	153.934.400	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.902.000	126.473.400	98,12
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.650.000	13.650.000	100
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.252.000	67.823.400	96,54
	3. Pengadaan Alat – Alat Studio	45.000.000	45.000.000	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.655.000	1.655.000	100
	1. Rapat Koordinasi Lintas SKPD	1.655.000	1.655.000	100

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

2. Aspek Kepegawaian

Untuk mencapai sasaran startegisnya, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur didukung oleh Pegawai/Aparatur dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	GOL	ESSELON	JUMLAH
1.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Strata 1	IV	III	1
2.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Strata 1	III	IV	1
3.	Kepala Sub BagianProtokol	Strata 1	III	IV	1
4.	Staf Pelaksana	Diploma 3	III	-	1
JUMLAH					4

*data per Desember 2019

Aspek kepegawaian SKPD pada tahun 2019 merupakan faktor penentu utama dalam pencapaian sasaran strategis pada Bagian Humas dan Protokol. Dengan kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur memiliki kekurangan staf pelaksana, sehingga diharapkan demi mempertahankan dan meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diperlukan penambahan jumlah pegawai pada Bagian Humas dan Protokol.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama menjalankan tugasnya “*melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka koordinasi di bidang hubungan masyarakat serta acara protokoler dan administrasi perjalanan dinas Pimpinan Pemerintah Daerah*”. Berdasarkan data yang disajikan dalam Bab III, secara umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Dari pengukuran kinerja yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja untuk sasaran “Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi” Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Untuk indikator Tingkat Akurasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan di Masyarakat, dari target 100% ; realisasinya 100%.
- Untuk indikator Tingkat Kelancaran Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah, dari target 100%; realisasinya 100%.

Berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik dan dinyatakan “ **Berhasil** “ dengan persentase realisasi kinerja sebesar **100%**. Dengan demikian, Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur dapat mempertahankan hasil kinerja tahun 2018 yang lalu yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2014 – 2019.

B. SARAN

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja, antara lain belum optimalnya penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan belum optimal, serta kompetensi SDM yang masih lemah. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan

penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Manggarai Timur.

Demikian penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019. Kiranya LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur di tahun-tahun mendatang.

Borong, 07 Januari 2020

**Kepala Bagian Humas dan Protokol
Setda Kabupaten Manggarai Timur,**

**Drs. Aleksius Rahman
P e m b i n a Tk. I
NIP. 19660906 199401 1 001**